

Strategi Pengelolaan Dana Beasiswa dalam Pemerintah Kabupaten Simeulue

Yuyuk Susela¹, Cici Darmayanti²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh

Email : yuyuksusela@gmail.com¹, cicidarmayanti@utu.c.id²

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Simeulue menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi, thesis dan KTI. Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa miskin. Namun penyaluran beasiswa masih belum bisa menuntaskan persoalan pendidikan di Simeulue sebab masih terdapat mahasiswa yang berhenti kuliah akibat kurang biaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kabupaten Simeulue Dalam mengelola dana beasiswa. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik dalam mengoleksi data adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan beasiswa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan disiplin anggaran. Transparansi yakni pengelolaan dana diadakan secara terbuka hal ini terlihat dari pengumuman penerimaan beasiswa dan persyaratan dibagikan secara luas melalui media sosial. Akuntabilitas yaitu dapat dipertanggung jawabkan pelaporan keuangan kepada publik. Partisipatif yaitu melibatkan semua unsur, seperti jajaran pemerintah, pihak kampus dan perwakilan mahasiswa baik ketika proses seleksi sampai dana beasiswa tersalurkan. Tertib anggaran yakni dengan mengikuti aturan undang-udang yang berlaku.

Kata Kunci: *Strategi, Pengelolaan, Dana, Beasiswa*

Abstract

The Simeulue Regency Government distributes scholarships to final year students who are preparing theses, theses and KTI. This scholarship is for poor students. However, the distribution of scholarships has not been able to solve the problem of education in Simeulue because there are still students who drop out of college due to lack of funds. The purpose of this study was to find out how the Simeulue Regency Government in managing scholarship funds. This research was conducted with a qualitative method. Techniques in collecting data are through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the management of scholarships carried out by the Simeulue Regency Government is based on the principles of transparency, accountability, participatory, and budgetary discipline. Transparency, namely that the management of funds is held openly, this can be seen from the announcement of scholarship receipts and requirements that are widely shared through social media. Accountability, namely being accountable for financial reporting to the public. Participatory, namely involving all elements, such as government officials, campus parties and student representatives both during the selection process until the scholarship funds are distributed. The orderly budget is by following the applicable laws and regulations.

Keywords: *Strategy, Management, Funds, Scholarship*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebuah usaha untuk mengasah keterampilan dan mengaktualisasikan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menuju masyarakat yang maju, sejahtera dan makmur (Raharjo, 2011, p. 98). Kemajuan sebuah bangsa tidak terlepas dari peranan orang-orang terdidik, mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Pendidikan dapat membawa dampak positif terhadap kemajuan pembangunan Indonesia. Semakin meningkatnya kaum berpendidikan sangat berdampak terhadap kemajuan bangsa dan bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 09 Tahun 2020 Pasal 05 Ayat 1 tentang penyaluran beasiswa menyebutkan bahwa calon penerima beasiswa pendidikan adalah santri dan mahasiswa tidak mampu yang berprestasi dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk menciptakan perubahan lain bagi individu, lingkungan dan bangsa menuju keadaan yang lebih baik, berkualitas, dan maju (Satrianawati, 2018).

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Kabupaten Simeulue menyalurkan beasiswa kepada anak kurang mampu dan anak berprestasi untuk menempuh pendidikan tanpa harus takut terkendala dengan dana. Beasiswa yang dikucurkan oleh Pemerintah Simeulue terbukti mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi jumlah anak yang putus sekolah. Pemerintah Simeulue mengalokasikan sekitar 20 % dari total APBD untuk pendidikan, ditambah lagi dukungan dari berbagai program nasional lainnya. Pemerintah Kabupaten Simeulue memandang sangat penting untuk memperkuat sektor ini, sebab pendidikan merupakan formula yang jitu untuk mengatasi kelangkaan sumber daya manusia berkualitas. Tahun 2021, total dana yg dikeluarkan itu sebanyak 1 sampai 2 Miliar. Jadi dengan dana sebesar itu, dibagi rata kepada berapa banyak mahasiswa yang mengajukan permohonan.

Penyaluran beasiswa diberikan untuk mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir seperti KTI, skripsi dan tesis dimana mahasiswa tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun, masih terdapat mahasiswa yang tidak menerima bantuan tersebut akibat kurang membaca informasi pengajuan berkas sesuai dengan yang dipersyaratkan. Untuk memastikan semua mahasiswa mengetahui tentang adanya beasiswa dan mematikan bahwa penyalurannya akan tepat sasaran, maka sangat diperlukan strategi yang baik Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah Simeulue dalam mengelola keuangan beasiswa. Azaz pengelola keuangan sebagaimana disebutkan oleh Jatmiko (2021) erat kaitannya dengan empat pilar, yaitu transparansi, akuntabel, partisipasi dan tertib anggaran. Keempat azaz ini harus melekat pada birokrasi pemerintah, agar pengelolaan keuangan bisa tepat sasaran dan diterima oleh semua pihak.

Transparansi merupakan sebuah prinsip yang memberikan jamin kepada masyarakat untuk memperoleh keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, kebijakan pemerintah dan hasil yang dicapai berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan (Krina, 2003, p. 21). Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip dimana masyarakat berhak untuk mengetahui pengelolaan informasi tentang keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah, kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang keuangan yang mencakup tentang kebijakan dan hasil yang akan dicapai.

Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (Denis & Riswanto, 2019). Prinsip akuntabilitas mengharuskan para pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan terhadap

hal yang menyangkut keuangan kepada publik, termasuk dalam penyaluran beasiswa. Prinsip ini juga merupakan kemampuan untuk menindaklanjuti komitmen yang telah mereka buat dalam sebuah instansi. Akhirnya, akuntabilitas menuntut para pemimpin untuk mengambil tanggung jawab dan kebanggaan dalam mendorong kepercayaan masyarakat.

Partisipatif mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam menyampaikan ide, pikiran dan aspirasi mereka (Karianga, 2017). Keterlibatan masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan audit pembelanjaan anggaran, hal ini untuk menciptakan kesempatan bagi semua pihak untuk terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan.

Tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa anggaran tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan (Sopanah, Fatoni, Danawanti, dkk, 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marhan (2021) menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan pengurusan proposal bantuan beasiswa penyelesaian studi sudah bagus meskipun sekiranya masih ada yang perlu dibenahi, Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan khususnya pada indikator penggunaan biaya, waktu pengurusan beasiswa ini masih belum terlalu jelas, belum nampak ruang konsultasi bagi para calon pemohon proposal bantuan beasiswa.

Berdasarkan latarbelakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue dalam Mengelola Dana Beasiswa. Dalam mengelola keuangan, pemerintah pusat telah mengatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan. Dalam hal transparansi pemerintah daerah memaparkan secara terperinci kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran meski mengarah kepada kebutuhan masyarakat sesuai dengan implementasi aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah menjamin kepada masyarakat untuk mempublikasikan penggunaan anggaran. Informasi mengenai anggaran tidak pernah tertutupi.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan anggaran. Akuntabel berarti bahwa pemerintah siap bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut. Azaz keterbukaan menuntut pemerintah daerah selaku penyelenggara yang siap bertanggung jawab kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran sesuai dengan aturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu dengan melibatkan komponen masyarakat secara keterwakilan dalam penggunaan anggaran.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu penggunaan anggaran sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam proses pengelolaan tenaga pendidik erat kaitannya dengan prinsip-prinsip manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:

- a. Prinsip humanisme yang mengedepankan rasa kemanusiaan.
- b. Prinsip gotong royong yang berdasarkan azas demokrasi.
- c. Prinsip kebenaran manusia pada posisi yang tepat.
- d. Prinsip pembayaran berdasarkan tingkat kesatuan kerja.

- e. Prinsip kesatuan pandangan yang sama dan terarah.
- f. Prinsip unity dengan mengedepankan kesatuan.
- g. Prinsip kemudahan dengan menjangkau sumber daya manusia.
- h. Prinsip tepat sasaran.
- i. Prinsip memproduksi kinerja.
- j. Prinsip profesionalitas
- k. Prinsip wewenang dan responsibilities.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini bermaksud untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan strategi pemerintah daerah Kabupaten Simeulue dalam mengelola beasiswa.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Hibah dan Dana Transfer, Kasubag Kesejahteraan Masyarakat dan Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat.

Sumber Data

Dalam penelitian ini yang dimaksud penelitian data adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data di antaranya sebagai berikut (Sugiyono, 2009, p. 137).

Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung peneliti dapatkan dari objek penelitian secara langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan informan penelitian. Adapun informan terdiri dari tiga orang yaitu, Rosdawati; Kasubag Kesejahteraan Masyarakat, Asnim; Kasubag Dana Hibah dan Transafer, dan Parioto; Kabag Kesejahteraan Masyarakat.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan tambahan dari data primer. Data sekunder ini dapat diambil dari literatur-literatur yang berhubungan dengan strategi mengelola beasiswa misalnya pada jurnal, skripsi, buku, media massa dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan strategi pengelolaan beasiswa oleh pemerintah daerah kabupaten Simeulue. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji data yang sudah didapatkan, diverifikasi dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian. (Suharsimi, 2014, p. 265).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut dokumentasi, Kabupaten Simeulue menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian, thesis untuk mahasiswa S-2, skripsi untuk mahasiswa S-1 dan KTI untuk mahasiswa D3 dan D-4, selain itu juga pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Data berikut ini merupakan rangkuman penyaluran beasiswa tahun 2021.

Tabel 4.1 Data Penerima Bantuan Beasiswa Tahun 2021

No	Penerima Bantuan	Jumlah	Bantuan diterima Per tahun	Keterangan
1	S3	14	1.059.000	Berprestasi / Umum
2	S2	597	564.000	Berprestasi / Umum
3	S1	305	822.000	Berprestasi / Umum
4	D3	356	1.000.000	Berprestasi / Umum

Sumber: Dokumentasi Setdakab Simeulue Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, total alokasi dana yang dikucurkan untuk beasiswa oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah 999.996.000. Dana untuk beasiswa terus meningkat setiap tahun. Adapun strategi dalam mengelola pendanaan beasiswa berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transparan

Transparan artinya ada keterbukaan dalam hal pengalokasian dana. Semua informasi disampaikan secara terbuka kepada seluruh mahasiswa. Seperti wawancara dengan, Paroto; Kasubag Kesejahteraan Masyarakat berikut ini:

“Kami lakukan dalam mengelola dan beasiswa Kabupaten Simeulu dengan keterbukaan. Mulai dari proses pendaftaran sampai dengan beasiswa itu tersalurkan ke rekening mahasiswa. Informasi pun tidak kami tutupi, kami bagikan ke media sosial seperti Facebook dan wa, agar mahasiswa bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan beasiswa”

Dari wawancara diatas, pengelolaan beasiswa di Kabupaten Simeulue sepenuhnya dilakukan dengan keterbukaan agar semua mahasiswa ber KTP Simeulue dapat mengajukan permohonan. Halmawati dan Mustin (2015, p. 124) mengatakan bahwa transparansi adalah hal pokok dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat meminimalisir kecurangan. Transparansi juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya wawancara dengan Rosdawati; Kepala Bidang Hibah dan Dana Transfer menyebutkan bahwa:

“Semua langkah dan tahapan dalam pengelolaan dan penyaluran beasiswa dilakukan dengan cara terbuka. Setiap mahasiswa akan diperiksa kelengkapan berkas dan validasi nya”

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami yang bahwasanya strategi pengelolaan dana beasiswa memang sepenuhnya berprinsip pada transparansi. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa transparansi ialah prinsip lebih mengarah pada aza keterbukaan dan kejujuran dari pemerintah untuk menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat dengan sejujur-jujurnya. Oleh karena itu, transparansi merupakan perwujudan dari demokrasi untuk melihat penggunaan keuangan secara terbuka kepada publik dan tidak ada yang dirahasiakan (Katz, 2004).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan dana beasiswa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue merupakan strategi yang sangat efektif untuk memberikan kepercayaan publik kepada pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan beasiswa adalah sebuah perilaku yang memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemegang saham, pengusaha, pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan beasiswa merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah Daerah yang merupakan sektor publik untuk bisa mempertanggung jawabkan keuangan kepada masyarakat. Mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan beasiswa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, wawancara dengan Asnim; Kepala Bidang Hibah dan Dana Transfer mengatakan bahwa:

“Mengenai dengan akuntabilitas dalam hal pengelolaan dana beasiswa tentu saja kami mempunyai laporan pertanggung jawaban sesuai dengan apa yang telah kami lakukan. Dalam hal pengelolaan dana beasiswa untuk membantu meringankan beban mahasiswa kami bisa mempertanggung jawabkannya”

Hasil wawancara diatas sangat jelas bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Simeulue dalam penyaluran beasiswa adalah dengan mengupayakan akuntabilitas supaya dana tersebut bisa disalurkan secara tepat sasaran. Menurut Haning, Hasniati, dan Tahili · (2021, p. 55) Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk semua tindakan dan aturan yang telah dilakukan dalam bidang keuangan. Oleh sebab itu akuntabilitas merupakan salah satu elemen yang sangat fundamental adalah hal pengelolaan organisasi publik. Wawancara dengan Rosdawati; Kasubag Kesejahteraan Masyarakat menyatakan bahwa:

“Jika ditanya tentang penyaluran dana beasiswa yang dilakukan oleh Pemkab Simeulu, tentu saja kami mengelolanya dengan memenuhi akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggung jawaban kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentunya harus sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Perencanaan yang sudah ditetapkan akan menjadi dasar untuk membangun prinsip akuntabilitas”

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Simeulue dalam hal mengelola dana beasiswa secara tegas mereka menyatakan bahwa mereka bisa mempertanggung jawabkannya. Pentingnya akuntabilitas untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap publik. Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Daerah. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja pemerintah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan untuk mengikuti sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik (Setyanto, 2022).

Beasiswa merupakan hal yang sangat penting disalurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan keuangan yang sehat seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, dimana akuntabel menjadi hal yang harus diperhatikan.

3. Partisipatif

Partisipatif adanya keterwakilan semua unsur dalam mengelola keuangan dan beasiswa. Wawancara dengan Rosdawati; Kasubag Kesejahteraan Masyarakat menyatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan beasiswa tentu saja kami melibatkan semua unsur. Unsur tersebut dari pemerintah daerah Kabupaten Simeulue Sendiri, mahasiswa dan pihak kampus. Keterlibatan ini untuk benar-benar memastikan jika mahasiswa calon penerima beasiswa berhak menerima dan memenuhi kualifikasi persyaratan.

Partisipasi semua unsur dalam proses perencanaan dibutuhkan untuk menggali informasi tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat. Adanya partisipasi semua unsur dalam mengelola anggaran memang sangat dibutuhkan guna menghindari penyalahgunaan anggaran. Menurut

Indriani, Nadirsyah , Fahlevi, dan Putri (2019) partisipasi akan mendorong terjadinya pertukaran informasi antara berbagai unsur dengan aparatur pemerintah. Partisipasi menjadi sebuah mekanisme legitimasi pemerintah karena penganggaran yang dibuat sesuai dengan kondisi aktual di lapangan dan sistem nilai yang dianut serta keadilan dari sebuah proses.

Adanya partisipasi merupakan sebagai suatu alat pengendali mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan secara periodik atas pencapaian pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai alat evaluasi. Partisipasi dalam hal pengelolaan beasiswa harus diupayakan selalu menyajikan data yang valid, akurat, terkini, sistematis, ringkas, sederhana, jelas dan tepat waktu sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat Adisasmita (2020) Dalam konsep pengelolaan keuangan ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan keakuratan keuangan: 1) adanya koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk melakukan usaha tersebut. 2) adanya keterarahan dan kesinambungan pelaksanaan yang dilakukan supaya tujuan dari pembangunan dapat tercapai.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Dalam mengelola keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Simeulue melakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini sebagaimana dalam wawancara dengan Rosdawati; Kasubag Kesejahteraan Masyarakat menyebutkan bahwa:

“Dalam mengelola keuangan tentu saja kami melakukannya berdasarkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 09 Tahun 2020 Pasal 05 Ayat 1 tentang penyaluran beasiswa -udang itu sudah jelas mengatur mekanisme penyaluran bantuan beasiswa”.

Tertib dan disiplin anggaran adalah perwujudan kewajiban agar pengelolaan keuangan beasiswa bisa berjalan dengan sistematis dan terstruktur. Disiplin anggaran menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut disiplin anggaran dalam pengelolaan beasiswa untuk memastikan bahwa penggunaan uang tersebut tidak menyimpang dengan aturan yang telah disepakati.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan beasiswa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue berdasarkan prinsip transparansi yakni pengumuman, persyaratan dan pengalokasian dana dilakukan dengan cara terbuka. Disisi lain, juga mengandung akuntabilitas artinya pengelolaan tersebut bisa dipertanggung jawabkan kepada publik. Selanjutnya adalah partisipatif dengan melibatkan semua unsur untuk memvalidasi keabsahan data mahasiswa. Serta tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan beasiswa berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku baik dari pusat maupun pemerintah setempat.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penulis hanya fokus pada empat poin dalam mendeskripsikan pengelolaan dana beasiswa di Kabupaten Simeulue sebab penemuan data dilapangan tidak sepenuhnya menggambarkan manajemen pengelolaan keuangan secara terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Hassan, A. (1990). *Antologi pembangunan koperasi Indonesia Indonesia: Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasi*. Departemen Koperasi. Bandung; Rineka Cipta.
- Krina L.P.L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Marhan, S. (2021), *Transparansi Pengelolaan Beasiswa Penyelesaian Studi S1 Dan S2 Di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar*. Pdf Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Haning, M.T, Hasniati, Tahili, M.H (2021). *Public Trust: Dalam Pelayanan Organisasi Publik Konsep, Dimensi Dan Strategi*. Makassar: Unhas Press.
- Raharjo, B. (2011) *Belajar Otodidak Membuat Database Menggunakan MySQL, Informatika*. Bandung; Rineka Cipta
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A (2014), *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jatmiko, U (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Melalui Alokasi Dana Desa*. Jakarta: Penerbit NEM.
- Denis, A & Riswanto, A (2019). Akuntabilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Koperasi Perguruan Tinggi (KPT) Mahasiswa. *ejurnal.stiedewantara*.
- Karianga, H. (2017). *Carut-marut pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah: perspektif hukum dan politik*. Jakarta: Kencana.
- Sopanah, A., Fatoni, I., Danawanti, M.I., & Harmadji, D.E (2019). *Bungai Rampai Akuntansi Publik: ilmu Kontemporeri Akuntansi Publik*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka.
- Satrianawati. (2018). *Media dan Sumber Belajar*. Bandung: Deepublish.
- Halmawati & Mustin (2015). Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif iTekanan Eksternal Dani Komitmen Organisasi. *Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA)*
- Setyanto, R. (2022). Analisisi Transparansi Dani Akuntabilitasi Pengelolaan Keuangan Di Fakultasi Ekonomi Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Magister Manajemen Unram Vol. 11, No 3. Agustus 2022*.
- Indriani, M., Nadirsyah., Fahlevi., H & Putri (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Rayai Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7 (1), 2019, 111-130